

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sebuah proses perebutan kepentingan politik berupa pemilihan pemimpin rakyat dalam rangka mewujudkan demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu rangkaian kegiatan politik yang mengurus kepentingan rakyat kemudian merumuskan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan. Pemilu adalah salah satu sarana kerakyatan demi mengatur struktur kekuasaan negara dengan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang ditetapkan di dalam UUD 1945. Pemilu adalah amanat konstitusi yang ditegakkan oleh pemerintah, dan dalam hal ini menjamin serta melindungi kedaulatan rakyat dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan hak politiknya di dalam pemilu. Pemilu merupakan salah satu implementasi berlangsungnya kekuasaan serta pemerintahan yang patut berdasarkan asas hukum yang berkeadilan serta harkat kegunaan.

Dalam kepustakaan ilmu politik sebagai prosedur demokrasi, terdapat lima fungsi pemilu yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain yang berkaitan dengan tujuan dari pemilu itu sendiri diantaranya: pertama, fungsi mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi kepala pemerintahan. Kedua, pemilu sebagai teknik bagi pergantian elit kekuasaan. Ketiga, fungsi perwakilan politik. Keempat, sebagai alat legitimasi politik. Kelima, sebagai alat pendidikan politik (dalam Gatara, S 2009)

Menurut para ahli yaitu Ibnu Tricahyo (dalam Budiyo 2016) mendeskripsikan pemilihan umum sebagai alat untuk melaksanakan wewenang rakyat, yang bertujuan untuk mendirikan rezim yang sah, dan sebagai sarana untuk mengekspresikan keinginan serta relevansi rakyat. Sedangkan menurut Soedarsono (dalam Budiyo 2016) pemilu merupakan ketentuan berdirinya demokrasi yang bertujuan untuk menetapkan pemimpin rakyat untuk terciptanya untuk membangun pemerintahan yang demokrasi. Eksposisi yang sudah dijelaskan membuktikan bahwa pemilu yakni ketentuan berdirinya demokrasi,

yang bermaksud untuk menetapkan pemimpin rakyat untuk membangun pemerintahan yang demokrasi. Wewenang rakyat dilaksanakan untuk wakil-wakil warga negara yang duduk dalam badan-badan perwakilan, Pemimpin juga dipilih secara serentak.

Pemilihan kepala desa mentaati dan dilandasi atas nilai-nilai gotong royong dan keakraban yang ditetapkan oleh masyarakat desa dan bertanggung jawab atasnya. Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi langsung yang dilakukan oleh desa itu sendiri, yang memungkinkan pemerintah desa untuk ikut berpartisipasi langsung dalam proses pemilihan serta andil dalam menentukan arah kegiatan desa itu sendiri. Dengan melihat sistem pemerintahan desa, kita dapat melihat gambaran perkembangan politik Indonesia melalui sistem demokrasi dan pemilihan anggota parlemen secara langsung. Karena akar demokrasi dan sistem pemerintahan yang terbentuk desa. Sistem pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dinamika perkembangan politik lokal di tingkat desa. Pemilihan kepala desa juga dibarengi dengan perebutan kekuasaan, seperti pada semua pemilihan umum di Indonesia. Dalam proses pilkada, dalam proses pilkada, calon kepala desa menggunakan berbagai cara untuk memenangkan pilkada dan meraih kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu hadir dalam setiap proses politik, yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan kepemimpinan. Untuk mengatasi proses pilkada dan merebut kekuasaan di tingkat desa diperlukan mobilisasi massa dan peperangan untuk memenangkan masyarakat desa (dalam Tomoning, 2015).

Dalam hal ini, pesta pilkades akan terasa berbeda dengan pilkdes yang diselenggarakan sebelumnya. Umumnya, kampanye pemilihan kepala desa selalu menjadi hari raya dasar yang kepentingannya selalu bisa ditebak. Baik digunakan dalam kampanye partai besar seperti mengorganisir konser dengan mengundang penyanyi, berbicara kepada orang banyak di jalan ataupun di tempat umum, kini itu semua menjadi berbeda. Kampanye pilkades 2021 yang seharusnya menjadi ajang prapemilu yang paling momentum kini terpaksa harus dibatasi akibat adanya pandemi Covid-19. Salah satu upaya alternatif yang dirancang untuk menghindari

kerumunan besar yaitu dengan meluncurkan kampanye virtual. Kampanye virtual adalah kampanye online (jaringan) atau media sosial yang dirancang untuk menyampaikan visi dan misi atau citra dari kandidat itu sendiri (Putri & Dwipriandi, 2021).

Dalam pelaksanaannya kampanye online (virtual dalam jaringan) ini banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi selama kampanye online/virtual ini diselenggarakan. Beberapa masalah tersebut terkait dengan kurangnya infrastruktur digital di banyak daerah di Indonesia. Menurut Beritasatu.com dilaporkan bahwa pembatasan kampanye virtual menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari sumber daya manusia, yaitu tidak semua orang memiliki standar yang memadai untuk keadaan komunikasi internet, dan banyak daerah perdesaan di Indonesia yang budayanya tidak dibuat secara digital dan memiliki kekurangan dalam hal mengakses ke jejaring sosial. Pada pemilihan kepala desa tahun ini ajang kampanye virtual pasangan calon se-indonesia bermain dengan ide dan isu untuk menarik perhatian dan suara publik. Media sosial ialah media online, yang mana para pengguna dapat dengan mudah menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Persepsi lain juga mengungkapkan bahwa media sosial ialah media online yang membantu jalinan sosial dan implementasi. Dengan demikian, media sosial dijadikan sebagai wadah sarana komunikasi yang memegang peranan penggunaannya untuk dapat ikut berpartisipasi secara aktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan respon secara terbuka baik untuk menghasilkan informasi ataupun dapat memberikan reaksi secara online dalam jangka yang cepat.

Peran dan pemanfaatan media dalam bidang politik sangat besar bagi perkembangan dan prosesnya, karena media itu sendiri memberikan keringanan dan memiliki banyak manfaat. Peran penting media untuk dapat memperoleh informasi dan wawasan serta sumber yang lebih banyak akan tetapi juga harus tetap diperhatikan. Partai politik dan tokoh-tokoh yang terlibat akan menggunakan media yang mereka lihat berpotensi tinggi untuk dapat meningkatkan profil mereka, dan mereka akan terus bekerja keras untuk mendapatkan banyak

dukungan dan simpati publik yang menggunakan media sosial. Media sosial cukup efisien sebagai sarana komunikasi politik dalam perjalanan kehidupan kerakyatan pada saat ini dimasa demokrasi era digital. Utamanya dalam kerangka aksi politik, media sosial telah berperan sebagai alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara aktor politik dengan elemennya secara jarak jauh dan dalam skala yang besar. Setiap aktor dan peserta politik bebas mengutarakan kepentingan atau hak politiknya tanpa ada hambatan yang dapat menghalangi proses komunikasi politik. Dengan media sosial, komunikator dapat menjalin komunikasi politik dengan pendukungnya, untuk membangun opini publik, dan memobilisasi sejumlah besar dukungan politik pada saat yang bersamaan. Penggunaan media sosial juga meningkatkan modal sosial aktor politik yaitu keterbukaan jaringan komunikasi politik, koneksi politik dan partisipasi politik masyarakat (Budiyono, 2016).

Di wilayah Kabupaten Purwakarta sendiri tentu saja memiliki banyak pengguna media sosial. Media sosial menjadi media baru yang sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan usia, baik itu pelajar, mahasiswa, elit politik, pengusaha dan lain-lain. Berbagai jenis media sosial yang dapat memperkenalkan profil, aktifitas, karakter, dan pencitraan diri penggunanya ini ternyata mendapat banyak tempat di hati masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hal ini disebabkan karena media sosial yang mudah di akses melalui handphone, komputer, dan fasilitas internet lainnya. Selain itu media sosial juga merupakan wadah yang cocok untuk mencari jati diri bagi mereka yang sedang berada dalam masa peralihannya.

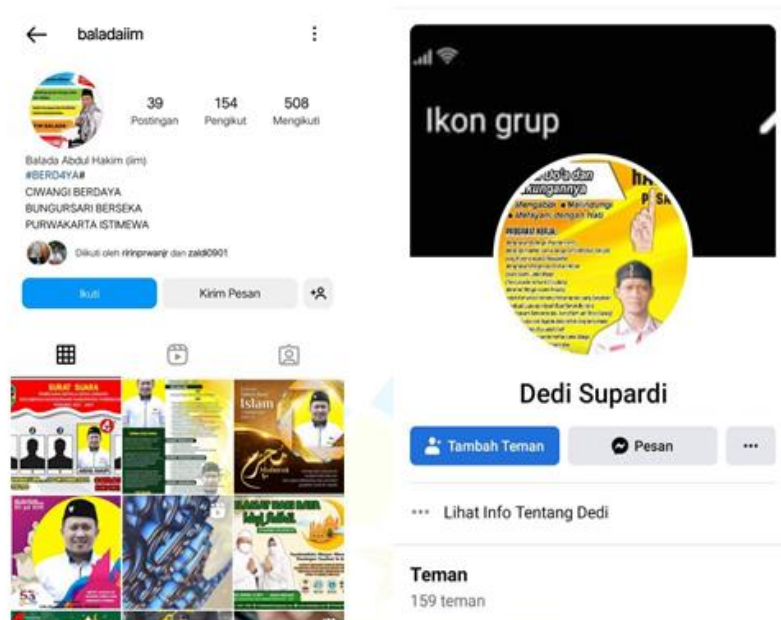
Pemilih pemula dalam pemilihan umum merupakan generasi pemilih baru dengan watak, kepribadian, lingkungan, dan kehidupan yang berlainan dari tiap keturunan sebelumnya. Mayoritas diantara dari mereka yang berasal dari bagian pelajar secara finansial dan biasanya berdomisili di perkotaan atau lingkungannya. Kelompok masyarakat ini amat tergerak oleh pertumbuhan kemajuan informasi dan memanfaatkannya dengan baik antara lain seperti handphone, tablet, laptop dan berbagai gadget lainnya. Mereka bebas mendapatkan dan mengkaji kegiatan

terbaru, krusial dan mandiri. Pemilihan umum mesti dikaji dengan baik untuk menyiapkan pemilih pemula yang berpendidikan, kritis dan berwawasan luas. Selain itu, para pemilih pemula ini akan menjadi pemimpin rakyat Indonesia berikutnya pada 100 tahun kedepan.

Di zaman yang modernisasi ini banyak tantangan dan hal yang besar mencakup tiap hari, media sosial memberi efek dan akibat untuk tiap orang terlebih lagi para generasi muda, karena disadari ataupun tidak banyak yang menanggapi berita di media sosial daripada yang didapat melalui langsung/nyata. Hal ini pun dijumpai dari keterpengaruhan media sosial di dalam pemilu. Hal yang mempengaruhi generasi muda di dalam pemilu adalah fakta atau kabar yang didapat melalui media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan lain-lain. Karakter dari seorang aktor politik atau calon pemimpin yang dibagikan melalui media sosial dijadikan sebagai hal keterikatan khusus untuk generasi muda. Kegiatan kesosialan dari calon kader dijadikan sebagai poin nilai bagi generasi muda tanpa memperhatikan dasar dan latar belakang kepemimpinan calon kandidat (Polii, dkk 2020).

Pada pemilihan kepala desa 2021 di Kabupaten Purwakarta khususnya di Desa Ciwangi, frekuensi dan konten informasi yang diberikan melalui media sosial berbeda-beda. Informasi politik tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Purwakarta 2021 yang beredar melalui media sosial dipastikan dapat mempengaruhi perilaku pemilih pemula saat memutuskan keputusan akhir pemungutan suara. Menurut survey yang sudah dilakukan oleh peneliti pemberian informasi para kandidat memanfaatkan akun media sosial masing-masing kandidat, pemilih dapat mengakses media sosial kandidat nomor urut 1 melalui alamat *Facebook* Dedi Supriadi yang diikuti oleh 159 pengguna *Facebook*. Sedangkan kandidat nomor urut 4 melalui *Facebook* Abdul Hakim yang diikuti 660 pengguna *Facebook* dan *Instagram* @baladaiim yang diikuti 154 pengguna *Instagram*. Informasi politik tentang calon kepala desa di pilkades 2021 yang diberikan lewat media sosial tentu memiliki peran terhadap perilaku pemilih pemula dalam menetapkan keputusan akhir memilih.

Gambar 1. Media Sosial Calon Kepala Desa



Sumber: <https://instagram.com/baladaiim?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Oleh karena itu berlandaskan tafsiran diatas peneliti terdorong untuk menggarap penelitian yang berjudul **“PENGARUH KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PILKADES 2021 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Desa Ciwangi Kabupaten Purwakarta)”**.

## B. Rumusan Masalah

Pada hal ini peneliti menafsirkan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana tanggapan pemilih pemula terhadap pilkades 2021 di Desa Ciwangi?
2. Apakah terdapat pengaruh kampanye terhadap perilaku pemilih pemula pada pilkades 2021 di Desa Ciwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan maksud serta tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti ingin mengetahui tanggapan pemilih pemula terhadap pilkades 2021 di Desa Ciwangi.
2. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kampanye terhadap perilaku pemilih pemula pada pilkades 2021 di Desa Ciwangi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan dengan tujuan dari penelitian yang sudah ditafsirkan diatas diharapkan memberi manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan juga pengetahuan dan untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diperoleh oleh peneliti semasa melakukan perkuliahan di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mempertimbangkan dan menyumbangkan gagasan yang berguna tentang pengaruh kampanye di media sosial terhadap perilaku pemula pada pilkades 2021 di Purwakarta.